

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara cermat dan terperinci guna memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku, sehingga memungkinkan terjadinya optimalisasi dalam pemanfaatan anggaran. Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan negara yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menyusun berbagai mekanisme dan regulasi terkait pengaturan pengelolaan keuangan negara. Mekanisme dan regulasi yang disusun oleh pemerintah ini mengatur implementasi pengelolaan keuangan negara dari berbagai tahap, baik dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Tahap pelaksanaan anggaran menjadi salah satu titik krusial dalam sebuah siklus pengelolaan keuangan negara yang memengaruhi kualitas belanja Satuan Kerja (Sukmono, 2022).

Pelaksanaan anggaran yang merupakan tahap implementasi dari perencanaan yang telah disusun secara matang, juga terkait erat dengan proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, APBN dilaksanakan setelah

rencana keuangan negara telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 1 tahun anggaran, yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/defisit anggaran, serta pembiayaan. Belanja negara diwujudkan dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Zaenudinsyah, 2016).

Belanja Pemerintah Pusat memerlukan pengelolaan pencairan dana yang baik agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dapat memiliki manfaat bagi penerimanya (Helmiawan *et al.*, 2022). Pencairan dana yang diajukan oleh Satuan Kerja harus memiliki keserasian dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum pada halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Halaman III DIPA telah mengatur perkiraan mengenai berapa pengeluaran yang akan dilakukan oleh sebuah Satuan Kerja. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, Sigit (2019) mengungkapkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara pengeluaran Satuan Kerja dengan RPD yang tercantum pada halaman III DIPA. Hal klasik yang menjadi permasalahan berulang pada setiap tahun anggaran adalah peningkatan pengeluaran Satuan Kerja pada akhir tahun anggaran (Sudarwati, *et al.*, 2017). Peningkatan pengeluaran ini terjadi baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan hal ini menimbulkan pertanda bahwa pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja belum dapat mencapai titik optimal (Zaenudinsyah, 2016).

Peningkatan pencairan dana ini dipengaruhi oleh karakteristik dari pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja, dan karakteristik belanja pada Satuan Kerja

disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Karakteristik belanja Satuan Kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain tingkat pagu dan jenis belanja yang dimiliki oleh Satuan Kerja. Dalam mengakomodasi kebutuhan setiap Satuan Kerja yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam melaksanakan pencairan dana khususnya pada akhir tahun anggaran, diperlukan regulasi yang dapat mengatur mekanisme pelaksanaan pencairan dana pada akhir tahun anggaran. Setiap tahunnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah merumuskan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Perdirjen Perbendaharaan yang mengatur Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran juga mengatur batas-batas waktu pengajuan pencairan dana untuk mengantisipasi penumpukan belanja pada satu periode. Dalam Perdirjen tersebut, batas-batas pengajuan pencairan dana diatur dalam beberapa periode sehingga mengurangi potensi adanya pengajuan semua jenis pencairan dana pada satu waktu. Walaupun Perdirjen tentang Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran telah diterbitkan oleh pemerintah setiap tahunnya, hal ini belum dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi peningkatan pencairan dana yang cukup tinggi pada akhir tahun anggaran. Helmiawan *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa pada tahun 2016-2021, rata-rata realisasi belanja seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) pada triwulan IV mencapai 41,13%. Realisasi triwulan IV menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan rata-rata realisasi triwulan I hingga triwulan III hanya mencapai 15,98% pada periode yang sama. Belanja yang tidak dilakukan

dengan tepat waktu, efektif, dan efisien belum mencerminkan kualitas belanja K/L yang baik dan tercermin dalam nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja.

Dalam praktik di lapangan pada akhir tahun anggaran, peningkatan pencairan dana pada akhir tahun masih terjadi dan menimbulkan stigma di masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pada akhir tahun anggaran hanya dikejar demi realisasi anggaran semata agar anggaran yang dimiliki oleh instansi pemerintah tersebut tidak dikurangi pada tahun depan sebagai bentuk dari tidak tercapainya realisasi anggaran instansi pemerintah tersebut (Irianto, 2021).

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pada setiap awal tahun anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran merilis daftar nilai IKPA Satuan Kerja per kelompok Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada tahun anggaran sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2022, KPPN Poso masuk ke dalam kelompok KPPN dengan nilai IKPA Satuan Kerja yang cukup rendah dalam lingkup KPPN Tipe A1 Non Ibu Kota Provinsi. KPPN Poso sendiri juga memiliki nilai IKPA yang lebih rendah dibandingkan dengan KPPN lain pada kelompok KPPN Tipe A1 Non Ibu Kota Provinsi pada wilayah Sulawesi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, perlu dilakukan analisis bagaimana strategi optimalisasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran yang dapat ditempuh untuk mengurangi peningkatan pencairan dana secara signifikan pada akhir tahun anggaran yang berulang setiap tahunnya. Hasil analisis tersebut penulis tuangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan

judul “Strategi Optimalisasi Pencairan Dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di KPPN Poso”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas oleh penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di KPPN Poso?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di KPPN Poso?
3. Bagaimana langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di KPPN Poso?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan akhir yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. Mengetahui bagaimana implementasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di KPPN Poso;
2. Mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran;
3. Mengetahui langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membahas mengenai strategi optimalisasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di

KPPN Poso berdasarkan perspektif tingkat pagu dan jenis belanja Satuan kerja. Analisis strategi ini didasari pada Perdirjen Jenderal Perbendaharaan yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Penulis melakukan analisis implementasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2018-2022 dengan lingkup KPPN Poso beserta Satuan Kerja pada wilayah pembayaran KPPN Poso yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan sebagai langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran, khususnya terkait dengan faktor memengaruhi proses pelaksanaan pencairan dana beserta strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan tidak hanya meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan negara pada akhir

tahun anggaran, namun juga untuk memahami faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan perspektif dan referensi baru terkait dengan implementasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran.

c. Bagi KPPN Poso dan Satuan Kerja mitra KPPN Poso

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pemahaman baru tentang implementasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran yang baik untuk menghindari adanya peningkatan pencairan dana pada akhir tahun anggaran secara signifikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis memuat gambaran umum penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang dari isu yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan yang menjadi batasan pada bagian pembahasan, manfaat serta sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II, penulis menguraikan dasar hukum serta teori yang relevan sebagai landasan penulisan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini. Teori yang diuraikan pada

bab ini berkaitan dengan garis besar tema yang dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III, penulis menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan penulis pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini juga menguraikan gambaran umum terkait objek penulisan yang menjadi fokus penulis pada Karya Tulis Tugas Akhir ini yakni KPPN Poso. Gambaran umum berisikan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta profil umum dari Satuan Kerja pada lingkup wilayah pembayaran KPPN Poso. Pembahasan hasil menguraikan pembahasan atas rumusan masalah yang berada pada Bab I terkait dengan topik Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu strategi optimalisasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di KPPN Poso.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV, penulis memuat simpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian pembahasan mengenai strategi optimalisasi pencairan dana pada Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran di KPPN Poso. Simpulan pada bab ini ditarik atas data dan fakta yang telah didapat dari hasil penelitian.